

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat jumlah penduduk absolut Indonesia di masa depan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan negara ini akan memiliki penduduk lebih dari 270 juta pada tahun 2025, lebih dari 285 juta pada tahun 2035, dan 290.000. Ini akan menjadi semua orang 2025-2045. Baru setelah 2050 populasi Indonesia akan berkurang. Indonesia telah mengalami proses urbanisasi yang pesat selama 40 tahun, sehingga saat ini lebih dari setengah dari total penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Proses ini menunjukkan perkembangan positif bagi ekonomi Indonesia karena urbanisasi dan industrialisasi akan membuat tumbuhnya ekonomi lebih maju dan menjadikan Indonesia negeri dengan tingkat pendapatan menengah ke atas.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa (total penduduk Indonesia tahun 2021). Kependudukan Indonesia merupakan data kependudukan terbaru berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri serta Data Pengelolaan Kependudukan (Adminduk) Ditjen Dukcapil. Dari jumlah tersebut, penduduk perempuan mencapai 134.229.988 dan penduduk laki-laki mencapai 137.119.901 dan 86.437.053 Kartu Keluarga. Sensus 10 tahun BPS mencatat rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,10% pada tahun 1961 dan 1971, kemudian meningkat dari tahun 1971 menjadi 2,31%.

Selain itu, rata-rata laju pertumbuhan penduduk mulai menurun menjadi 1,98 persen antara tahun 1980 dan 1990 dan terus menurun sebesar 1,44 persen antara tahun 1990 dan 2000. Pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 1,49 persen antara tahun 2000 dan 2010, tetapi nilai ini turun menjadi 1,25 persen antara tahun 2010 dan 2020. Pertumbuhan penduduk terus menurun, tetapi penduduk Indonesia terus bertambah. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 pada bulan September 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,2 juta jiwa. Dibandingkan hasil sensus 2010 (penduduk Indonesia 2021), jumlah penduduk Indonesia meningkat 32,56 juta, rata-rata 3,26 juta per tahun.

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program pemerintah untuk mengelola pertumbuhan penduduk. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, KB meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat melalui peningkatan usia perkawinan, kontrasepsi, peningkatan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesehatan keluarga. Ini telah ditetapkan sebagai inisiatif. -Menjadi mempromosikan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Hal ini kemudian diperbarui dalam Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kaya, dimana KB merupakan upaya untuk menentukan jarak dan usia yang ideal untuk melahirkan, melahirkan, hamil dan berteduh. Menurut hak reproduksi untuk membesarkan keluarga. kualitas.

Program Keluarga Berencana merupakan produk dari Kebijakan Publik Pemerintah, dimana pemerintah sebagai public servant dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-

Undang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tahun 2009 No. 52, BKKBN (Badan Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan merupakan penyelenggara program pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana.

Salah satu prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN) adalah tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang. Untuk itu, BKKBN sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program manajemen kependudukan dan keluarga berencana mengadvokasi keberhasilan prioritas pembangunan nasional RPJPN pada Agenda 5 Prioritas Nawashita melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 (2) menyatakan bahwa kependudukan adalah politik, ekonomi, masyarakat dan budaya penduduk setempat, agama, dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga merupakan upaya terencana untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas penduduk dalam segala aspek kependudukan. Masalah kependudukan selalu menjadi perhatian manusia, sehingga politisi dan kelompok ahli sering membahas ukuran populasi yang diinginkan dan potensinya untuk merangsang atau memperlambat pertumbuhan populasi.

Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir,

tetapi juga dikurangi dengan jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua kelompok umur. Dalam konteks spasial, migrasi juga mempengaruhi pertumbuhan penduduk, pendatang menambah jumlah penduduk, dan pendatang mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah. Populasi yang besar adalah positif untuk beberapa kelompok, karena memiliki populasi yang besar untuk dikembangkan dan sejumlah besar pekerja mengarah pada pembangunan ekonomi.

Glen. A. Welsch, Hilton dan Gordon diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw (2000:3) menjelaskan bahwa pengendalian merupakan suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efisien yang dapat menciptakan tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengatur laju atau mengontrol jalannya suatu tindakan agar dapat berjalan dengan sistematis dan efisien. Salah satu jenis pengendalian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menanggulangi masalah pertumbuhan penduduk ini yaitu pengendalian sosial dimana yang artinya, merupakan mekanisme yang mencegah penyimpangan sosial, mengajak masyarakat umum, dan membimbing mereka untuk bertindak menurut norma dan nilai bersama. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dari jumlah penduduk sebelumnya pada suatu wilayah tertentu pada suatu wilayah tertentu karena adanya perubahan fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil sensus penduduk 2020. Jumlah penduduk Malang adalah 843.810, tetapi pada tahun 2010 sekitar 820.243. Menurut hasil sensus September 2020, jumlah penduduk menurut Kartu Keluarga (KK) sebanyak 773.642 jiwa. Sementara 70.168 warga menentang KK. Dari lima kecamatan tersebut, pemukiman

penduduk Kedung Kandan paling tidak sesuai dengan KK. Jumlah penduduk kawasan Kedung Kandan adalah 207.428 jiwa.

Saat ini hampir setiap kota/pemerintah di Indonesia telah memiliki DSP3AP2KB (Kesejahteraan Sosial untuk Pembinaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana). Badan bawahan kota ini dulunya bernama Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM). Sejak tahun 2019, DSP3AP2KB Kota Malang telah memadukan fungsinya dengan kesejahteraan sosial dan telah menjelma menjadi Kota Malang kesejahteraan sosial, promosi perempuan, perlindungan anak, manajemen kependudukan dan keluarga berencana (DSP3AP2KB).

Kedudukan, misi, fungsi, dan proses kerja P3AP2KB Kesejahteraan Sosial dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan, Pengamalan, dan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak. Selain itu, Bakti Sosial P3AP2KB Kota Malang juga tertuang dalam Peraturan Walikota Malang No. 33 pada tahun 2016 dan disempurnakan oleh Perda Walikota Malang pada tahun 2019.

Menurut KK, 185.569 di antaranya merupakan warga Kedung Kandan. Sedangkan 21.859 orang lainnya bukan penduduk menurut KK. Sebaliknya, Kecamatan Crogen memiliki jumlah pemukiman yang tidak sesuai dengan KK paling sedikit di Malang. Menurut KK, 5.812 dari 94.112 tidak hidup. Jumlah penduduk yang tinggal setelah keluarga saat ini sekitar 88.300. Pada kesempatan ini, BPS juga mempublikasikan jumlah penduduk menurut kategori umur. Menurut Sunaryo, kota Malang didominasi oleh

kaum milenial dan Gen Z. “Generasi Z lahir antara 1997 dan 2012, dan milenial lahir antara 1981 dan 1996,” kata Sunaryo. Kota Malang memiliki populasi milenial sekitar 211.800 atau 25,21 persen. Generasi Z berpenduduk 213.800 jiwa atau 25,44 persen. Artinya, penduduk usia kerja Kota Malang sudah di atas 50 persen.

Keluarga berencana merupakan upaya membangun kebahagiaan dan kebahagiaan dalam keluarga. Tujuan utama keluarga berencana adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Dengan mengatur kelahiran istri atau ibu mendapatkan banyak kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak serta memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas sebagai ibu rumah tangga. Di sisi lain, suami atau ayah tidak perlu direpotkan dengan kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan anak secara tergesa-gesa.

Tidak hanya itu anak juga akan mendapat perhatian penuh dari orang tuanya, jelasnya akan berdampak positif bagi tumbuh kembang karakter anaknya sehingga menjadi manusia yang sehat jasmani, rohani, dan sosial sesuai dengan keyakinan agama untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Melalui KB, pemerintah kota berkewajiban membatasi jumlah anak yang lahir. H. Setiap keluarga memiliki hingga dua anak. Keluarga berencana yang tidak tanggap digunakan di semua lapisan masyarakat, dari kelas bawah hingga kelas atas. Oleh karena itu, program KB yang dilaksanakan merupakan bukti pelaksanaan upaya pemerintah dalam mengelola pertumbuhan penduduk.

Oleh sebab itu masalah pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian kita bersama karena kedepan persoalan kependudukan akan

semakin kompleks, persoalan kependudukan di Kota Malang tidak saja menyangkut persoalan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang masih tetap memerlukan penanganan namun juga menyangkut persoalan jumlah perubahan dinamika struktur rumus dan distribusi penduduk. Dengan program-program tersebut keluarga kurang mampu yang dibawah garis kemiskinan diharapkan menjadi wahana peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang bisa menjadi pembentuk masyarakat yang maju, modren, dan mandiri.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengurangi kesejahteraan penduduk negara tersebut, meskipun tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja ekonomi. Dampak lain dari kepadatan penduduk yang tidak terkendali adalah:

1. Tingkat kemiskinan meningkat karena pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi.
2. Kekurangan pangan akibat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan luas areal yang digunakan untuk produksi pangan.
3. Harga tanah dan rumah yang tinggi mengakibatkan munculnya permukiman atau permukiman kumuh di perkotaan.
4. Pemerintah berjuang untuk menyediakan fasilitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, perawatan kesehatan dan perumahan. Situs ini sudah ramai dengan pemukiman penduduk dan memiliki sumber daya yang tinggi.
5. Kebutuhan akan ruang dan lingkungan semakin meningkat.
6. Ketidakseimbangan antara kebutuhan lapangan kerja dan pertumbuhan penduduk, jika terus berlanjut, akan menimbulkan

masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dan konflik antar penduduk.

Dari segi kebersihan, semakin besar jumlah penduduk maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan, sehingga jumlah penduduk yang besar akan mempengaruhi kebersihan lingkungan. Kehadiran komite pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di tingkat nasional dan daerah bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di tingkat nasional dan daerah. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kependudukan adalah dengan memperkenalkan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah diatas yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsi dan menganalisis implemetasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

2. Untuk mendeskripsi dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan administrasi publik dan juga dapat menjadi bahan evaluasi, serta dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah informasi maupun pengetahuan mengenai Pengendalian pertumbuhan penduduk di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

1.4.2 Manfaaf Praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pelaksanaan program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Selain itu, melalui penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Dapat pula menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait pelaksanaan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada ilmu administrasi publik.

1.4.2.2 Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar mengenai Pelaksanaan Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk